



MENELAAH BAHAYA IDEOLOGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN PARTAI UMMAT DALAM TEORI FALSIFIKASI KARL R. POPPER

Raymond Palangan Bani Lodhu¹, Gualbertus Alexander Naibina², Selestianus Bhago Raso³, Samuel Mariano Tae Bata⁴

raymondbl2014@gmail.com¹, gibenaibina@gmail.com², selestianusbhagoraso@gmail.com³, sarnotae1@gmail.com⁴

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

Abstrak: Eksistensi partai politik merupakan bagian dari sistem pemerintahan dan demokrasi bangsa Indonesia. Salah satu partai politik yang ada di Indonesia adalah Partai Keadilan Sejahtera. Partai ini berawal dan dihembusi oleh nafas gerakan tarbiyah yang terinspirasi oleh gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang sarat dengan konsep Islamisme. Islamisme adalah paham yang menjadikan Allah sebagai penguasa dan pemegang kedaulatan penuh dengan hukum Islam sebagai dasar pelaksanaannya. Paham ini merupakan paham radikal karena mengagung-agungkan ideologi mereka sebagai hal yang paling benar dan memaksakan ideologi mereka kepada orang lain sekalipun dengan cara kekerasan. Dalam tulisan ini penulis mencoba untuk menelaah paham Islamisme ini dengan konsep masyarakat terbuka Karl R. Popper yang mirip dengan konsep demokrasi bangsa Indonesia. Hasil dari telaah konsep ini penulis menemukan fakta bahwa paham Islamisme merupakan paham totalitarisme, tradisionalisme, dan utopisme yang sangat bertentangan dengan konsep demokrasi masyarakat terbuka yang menjunjung tinggi keadilan, kebebasan berpendapat, dan rasionalitas berpikir. Di akhir tulisan ini penulis menyimpulkan bahwa ideologi Islamisme yang dianut Partai Keadilan Sejahtera adalah bahaya laten bagi keutuhan demokrasi bangsa Indonesia, dan penulis mengajak masyarakat untuk sadar akan bahaya laten ini dan berjuang untuk menjauhkannya demi keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

Kata Kunci: Islamisme, Demokrasi, Partai Keadilan Sejahtera.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara republik menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Salah satu produk dari demokrasi ialah keberadaan partai-partai politik dalam perpolitikan dan sistem pemerintah Indonesia. Partai-partai politik yang ada, dengan berbagai identitas dan tawarannya memiliki tujuan yang satu dan sama yaitu kesejahteraan masyarakat di berbagai sisi. Agar mewujudkan hal tersebut, maka partai-partai politik harus memiliki tempat di pemerintahan. Perjuangan mendapatkan kursi pemerintahan tersebut diselenggarakan dalam suatu arena kontestasi lima tahun sekali yakni pemilihan umum baik untuk lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Di Indonesia sendiri, pemilihan umum ini sudah terjadi sejak tahun 1955 dan akan terjadi lagi dalam waktu dekat ini yaitu 14 Februari 2024 untuk memilih calon legislatif di berbagai tingkat daerah pemilihan dan calon eksekutif negara (Presiden)¹, dan pada 27 November 2024 untuk memilih calon eksekutif daerah (Gubernur-

¹ Komisi Pemilihan Umum, "Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024", *Informasi Seputar Pemilihan Umum 2024*, https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta_pemilu, diakses pada 11 November 2023.

Walikota).² Berkaitan dengan partai politik, dalam kontestasi Pemilu 2024 ini, ada 24 Partai Politik yang menjadi pesertanya.³

Salah satu partai yang menjadi peserta kontestasi Pemilu 2024 ini adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Keadilan Sejahtera adalah sebuah partai politik bercorak islam di Indonesia. Pada awalnya, partai ini merupakan hasil dari gerakan dakwah atau *tarbiyah* di yang populer pada tahun 1990-an.⁴ Gerakan *tarbiyah* ini terinspirasi dari gerakan *tarbiyah Ikhwanul Muslimin* di Mesir yang identik dengan paham Islamisme yang menginginkan pemerintahan Allah dengan hukum Islam sebagai landasannya diterapkan di semua pihak sekalipun harus menggunakan kekerasan.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam tulisan ini penulis menelaah paham Islamisme Partai Keadilan Sejahtera ini baik dari sejarah dan visi misi partai itu sendiri, kemudian masuk ke ideologi Islamisme itu sendiri, kemudian menghadapkannya dengan pemikiran Karl R. Popper, seorang rasionalis yang mengedepankan epistemologi kritik dengan teori falsifikasi miliknya sekaligus seorang humanis yang menginginkan terciptanya suatu masyarakat terbuka yang bebas. Konsep masyarakat terbuka Popper ini mirip dengan konsep demokrasi yang dianut oleh Indonesia yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksud dari tulisan ini ialah melihat ideologi Islamisme yang dianut Partai Keadilan Sejahtera, apakah pemikiran mereka bertentangan dengan konsep demokrasi dan menakar sejauh mana bahaya dari ideologi Islamisme ini bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia yang sudah berlangsung dengan baik sampai saat ini.

1. Profil dan Ideologi Partai Keadilan Sejahtera

a. Profil, Sejarah, Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera

Sebagaimana sudah disampaikan dalam bagian pendahuluan, partai ini bermula dari gerakan *tarbiyah*.⁶ Gerakan ini kemudian memasuki arena politik dengan didirikannya Partai Keadilan pada tanggal 20 Juli 1998. Menjelang pemilihan umum 2004, Partai ini terancam tidak lolos pemilu karena tidak memenuhi ketentuan *electoral threshold* dan juga dengan salah satu alasan yaitu nuansa eksklusivitas partai yang condong pada agama islam. Hal ini kemudian mendorong Partai Keadilan untuk menyatukan dirinya dengan kekuatan politik lain sehingga akhirnya terbentuk Partai Keadilan Sejahtera pada 20 April 2002.⁷

Sebagai sebuah partai politik, Partai Keadilan Sejahtera tentu memiliki visi dan misi. Adapun visi umum dan visi khusus Partai Keadilan Sejahtera ialah untuk memperjuangkan ajaran islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; mengarahkan ajaran islam sebagai kekuatan transformatif dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang; dan menjadikan ajaran islam sebagai kekuatan yang menggalang dan memelopori kerja sama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang *Rahmatan lil-Alamin*; serta akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.⁸

² Widhia Arum Wibawana, "Jadwal dan Tahapan Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024", *detikNews*, <https://news.detik.com/pemilu/d-6556051/jadwal-dan-tahapan-pileg-pilpres-dan-pilkada-2024>, diakses pada 11 November 2023.

³ Komisi Pemilihan Umum, "Berikut 24 Partai Politik Peserta Pemilu 2024", *Berita KPU*, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11315/berikut-24-partai-politik-peserta-pemilu-2024>, diakses pada 11 November 2023.

⁴ Ach. Basyir, "Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Antara Gerakan Tarbiyah dan Pragmatisme", *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 3:2 (Yogyakarta: Mei 2014), hlm. 243.

⁵ Matias Daven, "Politik atas Nama Allah", *Jurnal Ledalero*, 18:1 (Ledalero: Juni 2019), hlm. 28.

⁶ *Ibid.*

⁷ Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, "Sejarah Partai Keadilan Sejahtera", *Berita PKS*, <https://pks.id/content/sejarah-partai-keadilan-sejahtera>, diakses pada 15 November 2023.

⁸ Ach. Basyir, *op.cit.*, hlm. 242.

Berkaitan dengan misi Partai Keadilan Sejahtera, mengutip dari laman pks.id, misi Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut: Meningkatkan pertumbuhan jumlah Anggota Partai dan mengokohkan integritas, solidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untuk menghadirkan kepemimpinan bangsa yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia; Mengokohkan soliditas Partai berskala nasional, mandiri, dan terbuka; Meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap ketahanan keluarga, pemuda, kepentingan masyarakat, dan lingkungan hidup; Serta memenangkan Pemilu dan meningkatkan kontribusi Partai dalam menggagas dan memperjuangkan kebijakan publik yang berpihak kepada kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara.⁹

b. Ideologi Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera, sebagaimana sudah disampaikan pada bagian sebelumnya berawal dari gerakan dakwah islam yang diadopsi dari gerakan *tarbiyah* model *Ikhwanul Muslimin* di Mesir dengan pemimpinya Hasan Al Bana dan Sayyid Quthb. *Ikhwanul Muslimin* yang mereka dirikan ini bersifat subversif dan kontra akan pemerintah Mesir saat ini sehingga akhirnya mereka dibunuh dengan alasan mengancam keutuhan negara Mesir akibat aturan-aturan yang dibuat bertentangan dengan aturan Islam.¹⁰

Ikhwanul Muslimin memiliki ideologi yang cukup keras yakni Islamisme. Islamisme adalah sebuah ideologi yang meyakini bahwa Islam memiliki seperangkat norma atau ajaran yang komprehensif dan unggul yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk ketertiban atau ajaran yang didasarkan kepada tafsir tertentu atas ajaran Islam.¹¹ Ideologi inilah yang kemudian dipakai oleh *Ikhwanul Muslimin* dalam nuansa dakwah dari kalangan umat sampai akhirnya menghantarkan tokoh dakwah untuk duduk di kursi pemerintahan bahkan tidak segan-segan harus menggunakan cara kekerasan dengan tujuan utama yaitu menjadikan Islamisme sebagai dasar negara atau biasa disebut dengan istilah *Khilafah Islamiyah* di mana Allah yang berdaulat secara penuh.¹²

Berkaitan dengan Partai Keadilan Sejahtera, partai ini mencoba membungkus Islamisme dalam gerakan dakwah di kalangan kampus secara rapi dan strategis sampai akhirnya membentuk partai politik untuk melenggangkan langkah Islamisme untuk masuk dalam tubuh pemerintahan bahkan menjadi asas baru pelaksanaan kehidupan berbangsa negara. Meminjam istilah Titin Yuniarti, Partai Keadilan Sejahtera melakukan strategi Islamisasi Kampus Ke Islamisasi Negara, dengan cara berdakwah ke kampus-kampus, serta konsolidasi internal dengan penguatan akidah dan akhlak para kader baik dari kalangan anak-anak maupun kalangan dewasa.¹³

2. Paham Ideologi Islamisme

Islamisme, sebagaimana sudah disampaikan pada bagian sebelumnya, bisa juga disebut dengan istilah fundamentalisme islam. Alasannya tentu saja karena pada dasarnya sama-sama mengarahkan bahkan memaksakan suatu masyarakat untuk hidup dengan dasar atau fundamen dari Al-Quran dan Sunnah Nabi.¹⁴ Berkaitan dengan ideologi Partai Keadilan Sejahtera yang dilatarbelakangi oleh gerakan *tarbiyah Ikhwanul Muslimin* dengan pelopornya yaitu Hassan al-Bana dan Sayyid Quthb, maka pembahasan tentang Islamisme akan lebih terkait dengan Islamisme dalam bingkai perspektif dua tokoh tersebut.

Ikhwanul Muslimin, sebagaimana sudah disampaikan dalam bagian sebelumnya

⁹ Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, "Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera 2020-2025", *Berita PKS*, <https://pks.id/content/visi-dan-misi>, diakses pada 15 November 2023.

¹⁰ Ach. Basyir, *op.cit.*, hlm. 245.

¹¹ Titin Yuniartin Surahman, "Identitas Politik Partai Keadilan Sejahtera", *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 12:2 (Purwokerto: Juli 2018), hlm. 266.

¹² *Ibid.*

¹³ Titin Yuniartin Surahman, *op.cit.*, hlm. 263-264.

¹⁴ Matias Daven, "Politik atas Nama Allah", *op.cit.*, hlm. 26.

merupakan gerakan islam radikal yang berusaha menciptakan suatu sistem *Khilafah* di negara Mesir. Dari gerakan ini, paham Islamisme semakin kuat bahkan berkembang menjadi keinginan mengislamkan dunia. Paham Islamisme memiliki dua unsur penting yaitu *Jihadisme dan Totalitarisme*.¹⁵ *Jihadisme* merupakan suatu paham lanjutan dari konsep *Jihad* dalam Islam yang pada awalnya diartikan sebagai usaha berjuang mempertahankan agama sebagai bagian dari iman atau ibadah kemudian menjadi paham bahwa pembunuhan terhadap kaum kafir adalah ibadah. Sementara itu, Totalitarisme adalah paham yang menghendaki adanya dominasi total atas manusia dengan tiga langkah yakni pengabaian hak dasar, pemusnahan sisi moral, dan penyingkiran jati diri.¹⁶ Islamisme bercorak totaliter karena paham ini mengingkingkan hukum Islam dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan di semua bidang.¹⁷ Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan tentang Islamisme, hendaklah diketahui bersama bahwa Islamisme adalah ideologi politik sehingga tidak bisa diidentikkan dengan Islam yang adalah agama dan kepercayaan yang melebihi sistem pemikiran serta tidak bisa dipaksakan sebagaimana merupakan sifat dari ideologi politik.¹⁸

Mengutip Matias Daven dalam tulisannya yang berjudul *Politik Atas Nama Allah*, ada empat unsur perjuangan yang hendak diraih dalam Islamisme. Unsur yang pertama ialah hukum islam (Syariat) menjadi dasar dan pedoman kehidupan masyarakat dan bangsa.¹⁹ Unsur yang kedua, sebagaimana sudah disampaikan dalam paragraf sebelumnya, Islamisme harus diberlakukan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali.²⁰ Maka dari itu paham *Jihad* menjadi suatu keharusan untuk ditegakkan dan dilakukan kepada kaum kafir atau *Jahiliyah*. Unsur ketiga ialah penguatan identitas diri melalui isolasi diri dari pengaruh budaya asing secara khusus budaya barat.²¹ Unsur yang terakhir ialah instrumentalisasi Islam sebagai sarana legitimasi kekuasaan politik.²²

Keempat unsur perjuangan Islamisme ini, dalam praktik untuk mencapai tujuannya yang sama yakni Kedaulatan Allah ini dibagi dalam dua kelompok besar berdasarkan sarana yang digunakan mereka. Kelompok pertama yang terdiri dari kelompok *Jihadis-Wahabi* dan kelompok *militan situatif* ini melegalkan kekerasan. Sementara itu, kelompok kedua yang memilih jalan non-kekerasan terdiri dari kelompok *aktivis indoktriner dan Pseudo-demokrat*.

Berkaitan dengan tulisan ini, penulis hanya membahas secara lebih mendetail tentang kelompok *Pseudo-Demokrat* yang memperjuangkan Islamisme melalui partisipasi aktif dalam sistem politik di mana mereka berada dan ambil bagian dalam pemilihan umum yang sarat dengan sistem demokrasi. Sekalipun mereka terjun dalam demokrasi, tetapi mereka hanya memandang demokrasi sebagai sarana dan tujuan mereka yang sama sekali tidak demokratis, yaitu usaha menjadikan hukum Islam sebagai dasar penyelenggaraan politik kenegaraan.²³

Kelompok keempat ini dapat ditemukan dalam Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi objek dalam tulisan ini. Salah satu bukti dari langkah Islamisme terselubung Partai Keadilan Sejahtera ialah hasil riset Setara Institute terhadap Kota Depok sebagai kota paling intoleran selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2020 sampai 2021 dengan indeks yang semakin

¹⁵ Matias Daven, "Memahami Pemikiran Ideologis Dalam Islamisme Radikal", *Jurnal Ledalero*, 17:7 (Ledalero: Juni 2018), hlm. 30.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 38.

¹⁷ Matias Daven, "Politik atas Nama Allah", *op.cit.*, hlm. 26.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 36.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 37.

²⁰ *Ibid.* hlm. 38.

²¹ *Ibid.* hlm. 39.

²² *Ibid.* hlm. 40.

²³ *Ibid.* hlm. 43.

memburuk dari tahun ke tahun.²⁴ Alasan utama ialah kebijakan pemerintah yang sarat akan kepentingan agama tertentu seperti merancang Perda Kota Religius pada 2021, larangan perayaan Valentine pada tahun 2020, dan perumahan khusus Muslim.²⁵ Kebijakan ini tentu saja karena latar belakang pemerintah Kota Depok sendiri yang sejak pilkada 2005 sampai 2020 selalu dipimpin oleh Kader Partai Keadilan Sejahtera bahkan pengaruh Partai Keadilan Sejahtera tersebut sudah sampai ke akar rumput.²⁶ Gambaran tentang situasi Kota Depok adalah salah satu bukti paham Islamisme yang ingin diterapkan oleh PKS.

3. Karl R. Popper dan Gagasan Masyarakat Terbuka

Karl Raimund Popper adalah seorang filsuf kelahiran Wina, Austria pada tanggal 28 Juli 1902, yang terkenal akan teori epistemologi kritik yang memberikan perhatian pada logika ilmu pengetahuan sebagai lawan dari teori positivisme logis yang terlalu menekankan pengetahuan pada kriteria verifikasi data dan pengalaman sebagai acuan terakhir dari ilmu.²⁷ Teori epistemologi kritik dari Popper biasa juga disebut dengan istilah teori falsifikasi. Baginya, kritik merupakan satu-satunya metode untuk mendekati kebenaran. Ilmu harus melihat apa yang salah dalam proposisi-proposisinya, dengan data bukan lagi sebagai sarana untuk mengkonfirmasi melainkan mengkritik teori.²⁸ Popper menilai bahwa metode verifikasi yang digaungkan oleh filsuf positivisme mengabaikan fakta yang anomali atau fakta yang dapat membuktikan bahwa teori yang berusaha dibenarkan dengan fakta-fakta yang mendukung itu salah.²⁹ Padahal, dengan menguji kebenaran teori melalui fakta anomali, maka teori yang ada semakin kuat. Ilmu pengetahuan yang ada berkembang dan maju bukan karena usaha pembenaran teori tetapi melalui usaha menyalahkan teori yang semakin ketat terhadap kemungkinan kesalahan dan kekeliruan.³⁰

Prinsip falsifikasi ini kemudian digunakan oleh Popper menyalahkan ideologi ideologi politik yang terlalu mengagungkan ideologi tersebut sebagai yang paling benar dan tidak dapat salah. Kritik ini sejatinya berasal dari konteks sosial lingkungan Popper yang hidup di lingkungan sosialisme, totalitarisme, dan marxisme yang menghalalkan segala cara termasuk kekerasan untuk menegakkan ideologi mereka.³¹ Kritik ini dirangkumnya dalam buku yang berjudul *The Open Society and Its Enemies*. Dalam bukunya tersebut, Popper mencoba menjelaskan bahwa peradaban dikhianati oleh para pemimpin dan membentuk suatu masyarakat tribal atau tertutup atau abstrak bahkan khayalan sehingga tidak terciptanya masyarakat yang bebas, terbuka dalam koridor etis, rasional dan kritis.³² Popper menawarkan konsep masyarakat yang humanis, bebas dan terbuka, serta siap dengan kemungkinan untuk

²⁴ Rakhmad Hidayatulloh Permana, "3 Tahun Berturut-turut Depok Jadi Kota Intoleran Versi Setara", *detikNews*, <https://news.detik.com/berita/d-6660972/3-tahun-berturut-turut-depok-jadi-kota-intoleran-versi-setara>, diakses pada 11 November 2023.

²⁵ Nurul Nur Azizah, "5 Fakta Depok Kota Intoleran: Pelarangan Valentine Sampai Rancang Kota Religius", *Konde.co*, <https://www.konde.co/2022/04/5-fakta-tentang-depok-kota-paling-tidak-toleran-versi-setara-institute.html/>, diakses pada 11 November 2023.

²⁶ Muhammad Naufal dan Ramadhan Rizki, "Akar Kuat PKS di Depok yang Hendak Dicabut Kaesang", *CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230718145238-617-974891/akar-kuat-pks-di-depok-yang-hendak-dicabut-kaesang>, diakses pada 11 November 2023.

²⁷ Mikhael Dua, *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Analitis, Dinamis, dan Diakletis* (Maumere: Ledalero, 2007), hlm. 53-54.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Welhendri Azwar dan Muliono, *Filsafat Ilmu: Cara Mudah Memahami Filsafat Ilmu* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 203.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Azril Azifambayunasti, "Relevansi Ide *The Open Society* Karl Popper Dan Multikulturalisme Dalam Pembelajaran Sejarah", *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 5:1 (Malang: Juni 2022), hlm 39.

³² Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, penerj. Uzair Fauzan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 214-216.

difalsifikasi dengan tujuan perbaikan konsep dan kehidupan masyarakat yang lebih baik.³³ Konsep ini dikemudian hari diidentikkan dengan demokrasi yang juga menjunjung tinggi hak dan kebebasan individu sebagaimana juga dianut oleh bangsa Indonesia.³⁴

Berkaitan dengan konsep masyarakat terbuka, Popper mencoba membandingkan konsepnya tersebut sebagai lawan dari konsep Plato, Hegel, dan Karl Marx yang mengandung tiga prinsip yaitu historisisme, utopisme, dan tradisionalisme. Popper mengkritik historisisme dengan menegaskan bahwa tindakan individu atau suatu reaksi tidak dapat diprediksi secara pasti.³⁵ Selain itu, pada dasarnya gerak individu itu selalu bebas dan tidak bisa patuh pada suatu ritme kaku apalagi penuh dengan keterpaksaan yang dibangun berlandaskan ideologi tertentu. Keterpaksaan pada suatu ideologi tertentu pada akhirnya akan membawa manusia jatuh pada sistem otokrasi, tirani, dan totaliter yang sangat kental dengan kekerasan.³⁶

Popper juga mengkritik utopisme akibat terlalu terobsesi akan cita-cita di masa depan tetapi menyetujui penderitaan yang terjadi sekarang, sebagaimana digagas oleh Karl Marx melalui pahamnya yang secara langsung mengamini kekerasan demi terwujudnya sistem tanpa kelas yang diidealkannya.³⁷ Kepercayaan bahwa masa depan pasti terjadi sehingga penderitaan yang dialami demi masa depan itu adalah suatu hal yang wajar, dipatahkan begitu saja oleh Popper dengan pemikirannya bahwa manusia tidak pernah tahu akan hari esok bahkan hari ini pun ia tidak akan tahu secara pasti apa konsekuensi yang ditimbulkan dari tindakan yang diambilnya.³⁸

Prinsip terakhir yang dikritik oleh Popper adalah tradisionalisme yang menolak perubahan sosial dan berorientasi pada cita-cita masa lalu. Popper menggambarkan sosok Plato sebagai sosok tradisional yang menganggap bahwa perubahan adalah upaya penghancuran sistem budaya, politik, dan sosial.³⁹ Hal ini tentu berdasar pada dunia ide Plato yang mengagung-agungkan ide dan menganggap bahwa perubahan hanya membawa manusia menjauhi ide yang sempurna, menuju pada suatu ketidaksempurnaan, kejahatan, dan kerusakan.⁴⁰ Kaum tradisional secara khusus mereka yang konservatif, melihat upaya perubahan sebagai pertanda penggulingan sehingga berjuang sedemikian rupa untuk mempertahankan sistem yang ada dengan segala kelemahannya.⁴¹ Tradisionalisme juga akan berujung pada kekerasan jikalau konsep tersebut terlalu ditekankan pada masyarakat tanpa melihat kondisi dan situasi yang terjadi saat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kritik Ideologi Islamisme PKS dalam Perspektif Masyarakat Terbuka

Islamisme yang merupakan ideologi dari Partai Keadilan Sejahtera adalah suatu paham radikal di mana hukum Islam menjadi dasar jalannya sistem dunia dengan Allah menjadi kedaulatan tertinggi. Kaum yang menganut pemahaman ini meyakini bahwa hukum Islam adalah hukum yang paling benar dan berkenan kepada Tuhan yang diimani mereka. Bagi mereka, paham ini harus ditegakkan ke semua orang tanpa terkecuali. Semua manusia diwajibkan untuk taat dan tunduk pada hukum Islam ini sekalipun harus melalui cara kekerasan. Secara ringkas, paham ini mirip dengan paham

³³ Azril Azifambayunasti, *op.cit.*, hlm 44.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Karl R. Popper, *Gagalnya Historisisme*, penerj. Nena Suprpto (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 3.

³⁶ Azril Azifambayunasti, *op.cit.*, hlm 43.

³⁷ Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, *op. cit.*, hlm. 435-436.

³⁸ Matias Daven, *Bahan Ajar Kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan 2023*, (Mauere: Ledalero, 2023), hlm. 64.

³⁹ *Ibid.* hlm. 67.

⁴⁰ Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, *op. cit.*, hlm. 48.

⁴¹ Matias Daven, *Bahan Ajar Kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan 2023*, *op.cit.*, hlm. 68.

marxisme, totalitarisme, dan sosialisme yang menjadi lawan dari konsep masyarakat terbuka Karl R. Popper. Alasan-alasan kemiripan paham ini adalah sebagai berikut.

Alasan yang pertama ialah Islamisme bercorak tradisional. Tradisionalis identik dengan Plato karena kaum tradisional menolak adanya perubahan dari pemikiran mereka dengan segala kekurangannya. Islamisme sangat mengagungkan ideologi islam mereka. Mereka menganggap bahwa paham mereka itu benar dan tidak dapat salah. Sikap mengagung-agungkan, menutupi ruang perbaikan dan kesalahan dari ideologi mereka inilah yang sangat bertentangan dengan Popper yang memegang teguh prinsip Falsifikasi. Falsifikasi mengandaikan keterbukaan diri untuk dikritik dengan tujuan mengubah pemahaman untuk semakin mendekati kebenaran. Popper membahasakan falsifikasi ini dengan mengatakan bahwa “saya mungkin salah dan anda mungkin benar, dan dengan suatu ikhtiar, kita mungkin bisa semakin mendekati kebenaran.”⁴² Hal ini menegaskan bahwa Islamisme tidak bisa dikatakan sebagai kebenaran sebagaimana dipahami oleh Popper dan kaum rasionalis, sebab Islamisme tertutup pada realita pengalaman dan hanya terbuka pada realitas fiktif dalam dunia ideologi mereka.⁴³

Alasan yang kedua ialah Islamisme menutup ruang humanisme dan kebebasan individu. Humanisme dan kebebasan individu adalah hal sentral dari konsep masyarakat terbuka Popper. Sementara itu, Islamisme menutup semua ruang itu dengan mengusung konsep *Khilafah Islamiyah* yang diikuti dengan gerakan *Jihad* dan *Totalitarisme*. Sebagaimana sudah disampaikan pada bagian sebelumnya, *Jihad* dan *Totalitarisme* secara jelas mengamini penderitaan manusia dan pengekangan daya nalar individu sebagai bagian dari proses mewujudkan cita-cita Islamisme yang sangat bernuansa utopis. Popper yang juga merupakan seorang humanis menentang paham seperti ini karena hal ini sama saja dengan mematikan daya nalar dan kreativitas individu atau kemerdekaan berpikir itu secara tidak langsung.⁴⁴

KESEMPATAN

Islamisme, sebagaimana sudah diuji dalam konsep masyarakat terbuka Karl R. Popper merupakan suatu ideologi yang bertentangan dengan konsep tersebut karena sifatnya yang sangat tertutup dan totaliter. Dari pernyataan tentang konsep Islamisme yang tertutup dan totaliter dan dilengkapi dengan fakta lapangan tentang Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana sudah dipaparkan oleh penulis dalam pokok Islamisme, penulis dapat menyatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera merupakan suatu bahaya laten bagi kelangsungan demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang bebas dan majemuk.

Penulis sama sekali tidak berniat menjatuhkan dan memvonis Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai radikal yang berbahaya. Hanya saja, melalui tulisan dan data yang sudah dipaparkan terkait dengan Partai Keadilan Sejahtera ini, penulis berusaha memberikan pandangan dari sudut pandang ideologi yang melatar belakangi berdirinya partai ini. Dari sudut pandang ideologi partai tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ideologi ini merupakan bahaya laten yang wajib diwaspadai oleh seluruh rakyat Indonesia agar kebebasan berpendapat serta kebebasan beribadah dan beragama tidak diganti oleh suatu paham radikal yang mengatasnamakan agama tertentu bahkan tidak segan-segan memakai cara kekerasan

⁴² Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, *op. cit.*, hlm. 526.

⁴³ Matias Daven, “Memahami Pemikiran Ideologis Dalam Islamisme Radikal”, *op.cit.*, hlm. 43.

⁴⁴ Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, *op. cit.*, hlm. 529.

demi terwujudnya cita-cita paham tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Azifambayunasti, Azril. "Relevansi Ide The Open Society Karl Popper Dan Multikulturalisme Dalam Pembelajaran Sejarah". *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 5:1, Juni 2022.
- Azizah, Nurul Nur "5 Fakta Depok Kota Intoleran: Pelarangan Valentine Sampai Rancang Kota Religius." *Konde.co*. <https://www.konde.co/2022/04/5-fakta-tentang-depok-kota-paling-tidak-toleran-versi-setara-institute.html/>, diakses pada 11 November 2023.
- Azwar, Welhendri dan Muliono. *Filsafat Ilmu: Cara Mudah Memahami Filsafat Ilmu*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Basyir, Ach. "Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Antara Gerakan Tarbiyah dan Pragmatisme". In *Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 3:2, Mei 2014.
- Daven, Matias. "Memahami Pemikiran Ideologis Dalam Islamisme Radikal". *Jurnal Ledalero*, 17:7, Juni 2018.
- Daven, Matias. "Politik atas Nama Allah", *Jurnal Ledalero*, 18:1, Juni 2019.
- Daven, Matias. *Bahan Ajar Kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan 2023 Maumere: Ledalero*, 2023.
- Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera. "Sejarah Partai Keadilan Sejahtera." *Berita PKS*. <https://pks.id/content/sejarah-partai-keadilan-sejahtera>, diakses pada 15 November 2023.
- Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera. "Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera 2020-2025." *Berita PKS*. <https://pks.id/content/visi-dan-misi>, diakses pada 15 November 2023.
- Dua, Mikhael. *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Analitis, Dinamis, dan Diakletis*. Maumere: Ledalero, 2007.
- Komisi Pemilihan Umum. "Berikut 24 Partai Politik Peserta Pemilu 2024." *Berita KPU*. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11315/berikut-24-partai-politik-peserta-pemilu-2024>, diakses pada 11 November 2023.
- Komisi Pemilihan Umum. "Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024." *Informasi Seputar Pemilihan Umum 2024*. https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta_pemilu, diakses pada 11 November 2023.
- Naufal, Muhammad dan Rizki, Ramadhan. "Akar Kuat PKS di Depok yang Hendak Dicabut Kaesang." *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230718145238-617-974891/akar-kuat-pks-di-depok-yang-hendak-dicabut-kaesang>, diakses pada 11 November 2023.
- Permana, Rakhmad Hidayatulloh. "3 Tahun Berturut-turut Depok Jadi Kota Intoleran Versi Setara." *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-6660972/3-tahun-berturut-turut-depok-jadi-kota-intoleran-versi-setara>, diakses pada 11 November 2023.
- Popper, Karl R. *Gagalnya Historisisme*, penerj. Nena Suprpto. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Popper, Karl R. *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, penerj. Uzair Fauzan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Surahman, Titin Yuniartin. "Identitas Politik Partai Keadilan Sejahtera". *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 12:2, Juli 2018.
- Widhia Arum Wibawana, "Jadwal dan Tahapan Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024", *detikNews*, <https://news.detik.com/pemilu/d-6556051/jadwal-dan-tahapan-pileg-pilpres-dan-pilkada-2024>, diakses pada 11 November 2023.